

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1. LATAR BELAKANG.....1

 1.2. LANDASAN HUKUM.....3

 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....6

 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....6

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

 LALU10

 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

 TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....10

 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH55

 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

 PERANGKAT DAERAH57

 2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....63

 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT77

 2.6. INOVASI PERANGKAT DAERAH77

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....87

 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL87

 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH94

 3.3 . PROGRAM DAN KEGIATAN.....96

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

 DAERAH.....113

BAB V PENUTUP144

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2025..13

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 202532

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas56

Tabel T-C.31 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.....64

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2027 BPBD Kabupaten Banyumas77

Tabel 2. Inovasi BPBD Kabupaten Banyumas78

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas Tahun 202695

Tabel T-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 202898

Tabel 4.1. Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas Terhadap Program Unggulan Bupati /TRILAS.....114

Tabel 4.2.1. Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027.....117

Tabel 4.2.2 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas dengan Program Delegasi Gubernur.....120

Tabel 4.2.3 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas dengan Program Prioritas Nasional.....123

Tabel 4.2. 4 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).....126

Tabel 4.2.5 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas dengan Program Strategis Nasional.....127

Matriks Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2027130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja Rancangan Awal) Rancangan Awal Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka BPBD Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Rancangan Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD; dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahunan juga diperlukan untuk mengadopsi perubahan kondisi termasuk risiko-risiko yang mungkin menghalangi pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Banyumas. Tata cara penyusunan rencana kerja Perangkat daerah termaktub dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup analisis Gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Dengan Rancangan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam Upaya mewujudkan Pembangunan daerah agar lebih terarah. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Maka penyusunan Rancangan Renja BPBD Kabupaten Banyumas sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renja Rancangan Awal
2. Penyusunan rancangan awal Renja Rancangan Awal
3. Penyusunan rancangan Renja Rancangan Awal
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir
6. Penetapan Renja Rancangan Awal

Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada RPD. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, Dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas RPJMD yang disusun ke dalam Rancangan Rancangan Renja PD, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Renja seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Banyumas akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Banyumas. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD,

sehingga Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Rancangan Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
 14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
 30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
 32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 33. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/136/TAHUN 2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2027.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman BPBD Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2027.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rancangan Renja K/L dan Rancangan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang menagtur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, seperti SPM atau *SDGs (Sustainable Development Goals)*. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan secara detail Rencana Kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2025

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja BPBD tahun 2025 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2025 sebesar Rp. 8.110.036.745,-. Sedangkan Jumlah Anggaran Belanja pada APBD Perubahan BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sebesar Rp. 7.289.571.042,-. Penyerapan anggaran BPBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.979.103.541,- (95,74 %).

BPBD Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPBD Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, Subkegiatan (Output)	Satuan	Realisasi Renstra s/d Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan, Subkegiatan (n-2) Tahun 2025						Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah (Renja Perubahan)	Pagu DPA	Realisasi Kinerja Renja Perangkat Daerah	Realisasi Anggaran	Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah (%)	Capaian Anggaran (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5	10=8/6	11
[1] Mengurangi Risiko Bencana										
	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.93	0.88		0.93		105.68		Nilai BNPB sudah rilis, Nilai IKD Kabupaten Banyumas 0,93
[2] Meningkatkan Kapasitas Kabupaten Banyumas Dalam Menghadapi Bencana										
	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0.93	0.88		0.93		105.68		Nilai BNPB sudah rilis, Nilai IKD Kabupaten Banyumas 0,93
[3] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1105855865		1077807612		97%	
	Prosentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan	%	105	100		105		105		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Prosentase penanganan korban bencana yang tertangani	%	100	100		100		100		Penanganan korban bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem

	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	100		100		100		Pelayanan sistem dasar penanggulangan bencana
[4] Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					133.680.640		132.382.989		99%	
	Jumlah Warga Kabupaten Banyumas yang menerima pelayanan informasi rawan bencana	Orang	1191138	525000		1191138		226.88		Medsos dan website 128.813 (instagram, Facebook bpbd) tatap muka Sosialisasi KIE by Undangan Narsum dan sosialisasi pemasangan EWS tanah longsor di 4 lokasi, keseluruhan sebanyak 1604 peserta Sosialisasi KIE dalam kegiatan pembentukan FPRB dalam periode Oktober - November :200 peserta dari FPRB Lebeng, Kracak, Sokawera, Kalikesur
[5] Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada	Orang	1134200	30		1134200		3780666.67		Medsos dan website 128.813 (instagram, Facebook bpbd) tatap muka Sosialisasi KIE by Undangan Narsum dan sosialisasi pemasangan EWS tanah longsor di 4 lokasi, keseluruhan sebanyak 1604 peserta Sosialisasi KIE dalam kegiatan pembentukan FPRB dalam periode Oktober - November :200 peserta dari FPRB Lebeng, Kracak, Sokawera, Kalikesur Capaian

	di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun									sangat tinggi karena penetapan target hasil retargetting adalah perhitungan kegiatan yang menggunakan anggaran, sedangkan perhitungan realisasi KIE dari triwulan 1 sampai triwulan 3 dan tahun 2025 adalah perhitungan dengan seluruh kegiatan tidak hanya yang by anggaran saja
[5] Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					21.180.640		20.589.989		97%	
[5] Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					112.500.000		111.793.000		99%	
	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	1		1		100		Dokumen Reviu KRB sudah selesai disusun dan sosialisasikan , menunggu proses legalisasi
[4] Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					430.314.500		414.475.427		96%	
	Jumlah Warga Negara yang menerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	1050	1000		1050		105		FPRB Lebeng Sumpiuh, FPRB Kracak Ajibarang.FPRB Kalikesur Kedungbanteng, FPRb Desa Sokawera Cilongok, FPRB Ketenger, FPRB Kabupaten

[5] Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					2.499.500		1.995.000		80%	
	Jumlah Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga	50	30		50		166.67		Katana di Desa Banteran Sumbang
[5] Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										
[5] Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					13.440.000		13.380.000		100%	
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	130	130		130		100		pengembangan kapasitas TRC di kemutug lor tanggal 11 Desember 2025
[5] Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota										
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman	Dokumen	1	1		1		100		Dokumen renkon gunung api slamet telah selesai disusun

	bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun									
[5] Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen		0		0				Sub Kegiatan tidak diambil, akan dialihkan utk sub kegiatan lain di anggaran perubahan
[5] Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					414.375.000		399.100.427		96%	
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kawasan	21	20		21		105		FPRB Lebeng Sumpiuh, FPRB Kracak Ajibarang, FPRB Kalikesur Kedungbanteng, FPRb Desa Sokawera Cilongok, FPRB Ketenger
[4] Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					419.434.000		415.155.476		99%	
	Persentase peningkatan respon cepat darurat bencana	%	100	100		100		100		Kejadian bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, sampai dg tw 4 tidak terdapat bencana kekeringan dan karhutla

[5] Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					249.832.500		247.553.610		99%	
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	8902	3750		8902		237.39		Kejadian bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, sampai dg tw 4 akhir bulan Desember 2025 tidak terdapat bencana kekeringan dan karhutla
[5] Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					157.014.000		155.651.866		99%	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	3328	3750		3328		88.75		Kejadian bencana banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, sampai dg tw 4 akhir bulan Desember 2025 tidak terdapat bencana kekeringan dan karhutla
[5] Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					12.587.500		11.950.000		95%	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	3	3		3		100		SK Bupati Banyumas Nomor 589 Tahun 2025 tentang penetapan status tanggap darurat bencana Banjir, tanah longsor dan angin kencang Kabupaten Banyumas terhitung mulai tgl 24 Oktober 2025 -24 November 2025, SK Bupati Banyumas Nomor 651 Tahun

										2025 tentang Perpanjangan status tanggap darurat bencana Banjir, tanah longsor dan angin kencang Kabupaten Banyumas terhitung mulai tgl 25 November 2025 -7 Januari 2026,
[4] Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					122.426.725		115.793.720		95%	
	Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	100		100		100		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana telah dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan yang perencanaan tahun 2025
[5] Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					3.000.000		2.999.800		100%	
	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	3	1		3		300		PKS dengan Unsoed

[5] Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					6.000.000		5.975.000		100%	
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	1		1		100		Sudah selesai di TW 3
[5] Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					46.134.000		46.086.500		100%	
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan	1	1		1		100		
[5] Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					34.500.000		28.396.820		82%	

	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	19	3		19		633.33		Serayu Rescue, SAR Banyumas, SERI Banyumas, SAR MTA, PISTON, Dompet Dhuafa, MDMC, Senkom, PMI, Bagana, LLHPB (lembaga Lingkungn hidup dan penanggulangan bencana aisyiah), Banser tanggap bencana, Pemuda Pancasila, LPBI NU, UMP, Baznas
[5] Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota										
[5] Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota					32.792.725		32.335.600		99%	

	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	1		2		200		Sudah di selesikan penyusunan dokumen jtipasna dan R3P (sudah dilegalisasi)
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.183.715.177		5.901.295.929		95%	
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3.67	3.63		3.67		101.1		Nilai Indeks Pelayanan Publik BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2025 kategori baik dengan nilai 3,67 yang merupakan nilai hasil evaluasi dan pengukuran kinerja unit penyelenggara pelayanan publik yang menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Nilai	3.774	3.747		3.774		100.72		Nilai resmi dari APIP belum keluar, nilai tersebut dari laporan nilai dan perangkingan di aplikasi SPIP BPBD Kab Banyumas

	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	89.35	89.80		89.35		99.5		Nilai berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada BPBD Kabupaten Banyumas
	Presentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100		100		Pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					19.750.000		19.620.900		99%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	22	12		22		183.33		Renstra 2025-2029, Evaluasi RTP TW 2 dan 3 , RTP Strategis 2025-2029, RTP Operasional 2026, Evaluasi RTP Strategis Tahun 2025, Evaluasi RTP Operasional 2026 Triwulan 4
[5] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8.271.000		8.264.900		100%	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	4		10		250		Dokumen Renstra Rancangan Akhir 2025-2029, Dokumen RTP strategis 2025-2029 dan Dokumen RTP Operasional Tahun 2026
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.479.000		11.356.000		99%	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	8		12		150		Laporan Evaluasi RTP TW 2 dan 3 Tahun 2025, Evaluasi RTP Strategis TW IV dan Evaluasi RTP Triwulan IV

[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.146.433.500		3.885.560.415		94%	
	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola	Jenis	2	2		2		100		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikelola
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					66.960.000		59.660.000		89%	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4		4		100		Pembayaran honor pengelola keuangan, pejabat pengadaan, dan pengurus barang
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.079.473.500		3.825.900.415		94%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	30		28		93.33		PNS 24, P3K 4, Berkurang 2 pegawai, kasubag keuangan dan analis kesiapsiagaan ahli muda karena pensiun
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah					241.437.324		239.899.810		99%	
	Jumlah Administasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola	Laporan	7	7		7		100		

[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2.223.500		2.221.600		100%	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		100		Pembelian peralatan listrik
[5] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					24.786.000		24.667.218		100%	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		100		Penyediaan alat tulis kantor
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.177.040		7.137.225		99%	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1		1		100		Pembelian cairan kebersihan
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor					139.013.000		138.350.963		100%	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		1		100		Penyediaan bahan logistik kantor (bbm operasional, makan minum rapat, makan minum natura, sewa pakaian adat)
[5] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12.336.634		12.329.700		100%	

	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		1		100		cetak dan penggandaan
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					54.814.650		54.106.604		99%	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	4		7		175		Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (4 luar daerah 4 dalam daerah),
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1.086.500		1.086.500		100%	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1		1		100		selesai di TW 2
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					38.010.000		37.580.300		99%	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6	3		6		200		Laporan pembelian bendera 4 unit
[5] Pengadaan Mebel					3.300.000		3.196.800		97%	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	6		6		100		Sudah selesai di TW 2
[5] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.000.000		33.688.500		99%	

	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	3		3		100		Sudah selesai di TW 2
[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					710.000		695.000		98%	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	3		5		166.67		Pembelian bendera 4 unit
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.509.444.353		1.490.246.755		99%	
	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	8	2		8		400		Laporan Pembayaran tagihan listrik, air, telephone, internet, pengelolaan sampah, surat kabar dan Laporan Pembayaran Jasa Non ASN
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					135.405.500		132.964.873		98%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4		4		100		Pembayaran tagihan listrik, air, telephone, internet, pengelolaan sampah, surat kabar
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.374.038.853		1.357.281.882		99%	

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4		4		100		Pembayaran jasa non ASN
[4] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					228.640.000		228.387.749		100%	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	13	3		13		433.33		Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					149.250.000		149.165.549		100%	
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	96	26		96		369.23		kendaraan 12 Unit
[5] Pemeliharaan Mebel										
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		0		0				terdampak efisiensi anggaran
[5] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					29.385.000		29.235.600		99%	

	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	58	20		58		290		pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya :printer, laptop, senso 2
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					50.005.000		49.986.600		100%	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		1		100		pemeliharaan gedung kantor

Sumber : Emonev BPBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

1. Capaian kinerja tahun 2025 untuk Indikator Tujuan dan Sasaran yaitu Indeks Kapasitas Daerah dengan target 0,88 realisasi sebesar 0,93 dan capaian sebesar 105,68 %.
2. Capaian kinerja Prosentase Mitigasi Bencana Yang Dilaksanakan : 105 %
3. Capaian kinerja Prosentase penanganan korban bencana yang tertangani : 100 %
4. Capaian kinerja Prosentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana : 100 %
5. Capaian Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah :101,1 %
6. Capaian Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah : 100,72 %
7. Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah : 99,5 %
8. Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Penanggulangan bencana adalah 100 %.
9. Analisis penyebab keberhasilan / pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan :

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Dalam upaya mewujudkan Banyumas yang tangguh bencana, pencapaian IKD tahun ini merefleksikan keberhasilan sinergi antara kebijakan strategis pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat. Kabupaten Banyumas telah memenuhi standar target pada prioritas IKD nomor 1,2,4,dan 7 yaitu perkuatan kebijakan dan kelembagaan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Langkah nyata dalam pencapaian target tersebut diantaranya :
 - a. Kegiatan Pengukuhan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
 - b. Banyaknya kegiatan sosialisasi serta simulasi di sekolah-sekolah
 - c. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten dan Desa
 - d. Penyusunan dokumen jitupasna kejadian bencana tahun 2024 dan Dokumen R3P Kejadian Bencana Tahun 2024 dan residu bencana tahun 2022 serta 2023 telah selesai dilaksanakan.
 - e. Fungsi BPBD Kabupaten Banyumas sebagai koordinator, komando dan pelaksana telah berjalan dengan baik dengan adanya TRC Lintas Sektor

- f. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana telah dilaksanakan dengan baik
 - g. Dokumen renkon banjir, tanah longsor dan gunung api telah disusun.
 - h. Adanya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang masih berlaku dan telah direviu kembali pada tahun 2025
 - i. Penyusunan Dokumen Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2024
 - j. Adanya dukungan data dari lintas sektor dan lintas OPD sehingga semakin menguatkan bahwa upaya penanggulangan bencana telah melibatkan kolaborasi dari semua pihak
 - k. Penetapan status tanggap darurat dan adanya kegiatan penanggulangan bencana yang telah berdampak pada penurunan frekuensi kejadian bencana dan memberikan dampak perbaikan ekonomi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan adanya upaya yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan prioritas dalam komponen Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
- 2) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota capaian melebihi target yang telah ditetapkan karena Banyaknya undangan pelaksanaan Sosialisasi KIE dari desa dan sekolah, dan adanya postingan peta potensi banjir dan gerakan tanah yang di repost oleh influencer lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi akan bahaya bencana di sekitarnya.
- 3) Sub Kegiatan : Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan BPBD di Kabupaten yang berbatasan langsung dengan kabupaten Banyumas memiliki ancaman bencana yang hampir serupa di wilayah perbatasan sehingga mendorong kesamaan visi untuk saling bekerja sama. Dan terdapat kesamaan program yang hendak dicapai yang diwujudkan melalui kegiatan kerja sama.
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Kabupaten/ Kota, capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan karena adanya keterlibatan dan peran serta organisasi/lembaga dalam mendukung kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pascabencana.

- 5) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana capaiannya melebihi target dikarenakan adanya Dukungan anggota TRC-Lintas Sektor dari berbagai instansi dan dukungan masyarakat, Koordinasi dan hubungan lintas sektor penanggulangan bencana telah berjalan baik di Kabupaten Banyumas.

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah :

- 1) Hambatan masih kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder untuk ancaman bencana di sekitarnya sehingga solusi yang telah dilakukan adalah Melaksanakan Sosialisasi, Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) kepada stakeholder terkait.
- 2) Hambatan kurangnya kesiapan masyarakat dan stakeholder dalam menghadapi bencana, solusi yang telah dilaksanakan adalah Melaksanakan kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang terstruktur, terpola dan terkonsep.
- 4) Hambatan kurangnya kesadaran masyarakat dan stakeholder terkait terhadap potensi, kerawanan dan kerentanan bencana, solusinya adalah Memberikan himbauan kepada masyarakat dan stakeholder terkait mitigasi bencana baik melalui tatap muka, media sosial, situs online internet.
- 5) Hambatan Dokumen (Renkon) Rencana Kontijensi yang tersusun baru 2 dokumen yaitu Renkon Banjir Kec. Tambak, Kec. Sumpiuh dan Kec. Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan Dokumen Rencana Kontijensi Tanah Longsor, solusi yang telah dilaksanakan adalah Pada tahun 2025 telah melaksanakan penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gunung Api Slamet secara mandiri tanpa anggaran.
- 6) Hambatan Keterbatasan peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, kondisi ini membuat BPBD Kabupaten Banyumas harus memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada, solusi yang telah dilaksanakan adalah Menginventarisir peralatan yang masih memiliki kondisi baik dan rusak serta menghitung jumlah kebutuhan peralatan penanggulangan bencana dan mengusulkan kepada Kabupaten Pemerintah Banyumas dan Pemerintah Pusat untuk peralatan.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra BPBD Kabupaten Banyumas s/d Tahun 2026 Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah : BPBD Kabupaten Banyumas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Akhir Renstra Tahun 2025-2029 (Tahun 2030)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2026	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
	1.	Menurunnya risiko bencana									
		Indeks Risiko Bencana	Angka	97,45	N/A	N/A	N/A	N/A	103,7	103,7	106,41%
	1.1	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana									
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,93	N/A	N/A	N/A	N/A	0,89	0,89	95,70%

					Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah										
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	89,85	N/A	N/A	N/A	N/A	89,81	89,81	99,96%
						Nilai SPIP Perangkat Daerah	%	3,752	N/A	N/A	N/A	N/A	3,748	3,748	99,89%
						Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	%	3,68	N/A	N/A	N/A	N/A	3,64	3,64	98,91%
1					URUSAN PEMERINTAHAN		%								
1	05				BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		%								
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah	Angka	86,5	N/A	N/A	N/A	N/A	85,5	85,5	99%
						Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	97	N/A	N/A	N/A	N/A	97	97	100%

						Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	85,15	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85	100%
						Nilai kematangan organisasi	Angka	47	N/A	N/A	N/A	N/A	43	43	91%
						Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra		100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
						Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		%								
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	100%

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
						Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	30	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	100%
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	100%
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										

						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	100%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	100%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	%	69,00	N/A	N/A	N/A	N/A	65	65	94%
						Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Angka	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	100%
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	100%
1	05	01	2.06	0009	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										

						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	100%
1	05	01	2.06	0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	N/A	N/A	N/A	N/A	48	48	100%
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	25%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

						Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	%	84	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	95%
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel										
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6	N/A	N/A	N/A	N/A	31	31	517%
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	182%
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	100%
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	33%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
						Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	83	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	84%

1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	N/A	N/A	N/A	N/A	26	26	90%
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel										
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	100%
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	100%
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%

1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	%	35,95	N/A	N/A	N/A	N/A	23,87	23,87	66%
						Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	%	100					50	50	50%
						Persentase penanganan korban bencana yang tertangani	%	100					100	100	100%
						Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana	%	100					100	100	100%
						Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	%	100					100	100	100%
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang menerima pelayanan informasi rawan bencana	Orang	870.000	N/A	N/A	N/A	N/A	670000	670000	77%

1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)										
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	870.000	N/A	N/A	N/A	N/A	670000	670000	77%
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang menerima Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	2.000	N/A	N/A	N/A	N/A	1600	1600	80%

1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota										
						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	1.400	N/A	N/A	N/A	N/A	1100	1100	79%
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam										
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana										

						Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota										

						Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	17	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	24%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

						Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
						Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
						Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas										
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota										

						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	100%
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	25.400	N/A	N/A	N/A	N/A	3750	3750	15%
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	100%

1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota										
						Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang	41	N/A	N/A	N/A	N/A	41	41	100%
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	25400	N/A	N/A	N/A	N/A	3750	3750	15%

1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit										
						Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	100%
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	%	100	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100%

1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	0%
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan										
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%

1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Dokumen	5	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	80%
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	100%

1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota										
						Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga	5	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	60%

1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota										
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	2	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	50%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

BPBD mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penanggulangan bencana di wilayah kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Adapun susunan organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri dari:

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari ;
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Pejabat Fungsional Perencanaan;
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional;
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional;
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - a. Pejabat Fungsional;
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2026

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2026 sebesar Rp. 9.750.286.307,- terurai dalam 2 program dan 11 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2025, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banyumas

No	Indikator (tujuan dan sasaran)	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Risiko Bencana			N/A	103,7	102,13	100,57	82,87	0	102,13	100,57	Melebihi target
	Indeks Ketahanan Daerah			0,88	0,89	0,90	0,91	0,93	0	0,90		Melebihi target
A.	PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA											
1.	Persentase Forum Penguranga n Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	SPM		N/A	23,87	26,89	29,91	21,14%	0	26,89	29,91	Tercapai
2.	Persentase Ketersediaa n Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	SPM		N/A	62,50%	75%	87,50%	37,50%	0	75%	87,50%	Tercapai
3.	Persentase penanganan korban bencana yang tertangani	SPM		100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	Tercapai
4.	Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana	SPM		N/A	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	Tercapai
5.	Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASN A)	SPM		N/A	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	Tercapai
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota											

1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		IKK	670.000	720.000	770.000	820.000	1.191.138	0	770.000	820.000	Melebihi target
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		IKK	1.000	1.600	1.700	1.800	1.050	0	1.700	1.800	Melebihi target
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah											
B.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			89,81	89,82	89,83	89,84	89,35	0	89,83	89,84	Nilai SAKIP Tahun 2025 turun sebesar 0,3 point dan target Tidak Tercapai
2.	Nilai SPIP Perangkat Daerah			3,748	3,749	3,75	3,751	3,774	0	3,75	3,751	Melebihi target
3.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah			3,64	3,65	3,66	3,67	3,67	0	3,66	3,67	Melebihi target

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana;

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan *SWOT* (*Strength, Weakness, Opportunities, Threat*). Analisis *SWOT* juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD. Untuk lebih jelasnya hasil analisis *SWOT* sebagai berikut:

A. *Strength* (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada saat pra bencana, kejadian bencana maupun pascabencana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Banyumas adalah adanya kemauan, kesadaran dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pegawai baik ASN, Non ASN maupun TRC Lintas Sektor dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik;
2. UU Nomor 24 Tahun 2007 memberikan kekuatan yang sangat besar berupa fungsi komando kepada BPBD pada saat status keadaan darurat bencana;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima;
4. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas yang dapat semakin memperkuat dan mendukung BPBD Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan tugasnya;
5. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020. Merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas di dalam melaksanakan bagi BPBD Kabupaten Banyumas pada saat pra bencana, saat terjadinya bencana maupun pascabencana;

6. Fungsi BPBD sebagai koordinator, komando dan pelaksana menjadikan posisi BPBD semakin kuat dan dapat menjadi *leader* bagi OPD lain dalam penanggulangan bencana;
7. Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2023-2027 sebagai acuan pemetaan potensi bahaya bencana di Kabupaten Banyumas DAN Dokumen Reviu Kajian Risiko Bencana Tahun 2025-2030;
8. Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Banyumas yang dijadikan dasar yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana;
9. Rencana Kontinjensi Banjir Bencana Banjir Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan Tambak Tahun 2023 sebagai pedoman guna mencegah dan menanggulangi secara lebih baik dalam situasi kritis atau darurat bencana Banjir pada Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sumpiuh;
10. Rencana Kontinjensi Tanah Longsor sebagai pedoman dalam mencegah dan menanggulangi dalam situasi darurat bencana tanah longsor;
11. Rencana Kontinjensi Gunung Api Slamet sebagai pedoman guna memetakan ancaman, menentukan skenario dampak, jalur evakuasi, serta menetapkan tugas pokok instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
12. Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
13. Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
14. Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bencana Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
15. Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana Bencana Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan dan Cuaca Ekstrem Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
16. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
17. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Banyumas Tahun 2023.
18. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

B. *Weakness* (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan, BPBD Kabupaten Banyumas juga memiliki kelemahan-

kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kecilnya anggaran yang ada dikarenakan keterbatasan APBD. Menjadikan kinerja BPBD pada Pra Bencana belum optimal dan belum semua dilaksanakan seperti rencana kontijensi ataupun pengadaan rambu evakuasi dan sistem peringatan dini sehingga manajemen penanggulangan bencana yang belum bisa optimal;
2. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Banyumas membutuhkan peremajaan dan harus diperbaharui karena masih kurang memadai, kondisi ini membuat BPBD Kabupaten Banyumas harus memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada;
3. Tidak memiliki bangunan gedung perkantoran dan penyimpanan sarana, logistik, peralatan dan kendaraan yang memadai sebagai bentuk kesiapsiagaan dan mendukung respon cepat keadaan darurat;
4. Peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki BPBD Kabupaten Banyumas masih kurang memadai;
5. Peralatan kantor seperti laptop, printer yang ada jumlahnya kurang memadai;
6. Indeks ketahanan daerah untuk pemenuhan nilai indeks prioritas pada Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik (P3), Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana (P5), Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana (P6) masih rendah dan belum maksimal;
7. Masih kurangnya kompetensi dan sertifikasi pegawai penanggulangan bencana.

C. *Opportunity* (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya dukungan, kolaborasi dan peran aktif dari eksekutif dan legislatif, lembaga lain/instansi unsur pentaheliks (Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media massa) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Kerjasama dengan pihak lain (pemerintah, universitas, media, dunia usaha dan masyarakat) dalam bidang penanggulangan bencana;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;

4. Telah tercapainya pemahaman dan persamaan persepsi bersama *stakeholder* terhadap manajemen penanggulangan bencana sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 di Lingkungan OPD Kabupaten Banyumas;
5. Penanggulangan bencana telah mengalami perubahan paradigma dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana;
6. Kemudahan akses dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
7. Dukungan regulasi Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan masyarakat dari bencana;

D. *Threat* (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Perubahan iklim yang berakibat pada keadaan perubahan cuaca ekstrim dan Tidak menentunya cuaca/iklim membuat kinerja BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanganan bencana menjadi lebih ekstra ;
2. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banyumas pada lereng Gunung Slamet dan perbukitan sehingga rentan Gunung Meletus, Banjir, tanah longsor, Angin Puting Beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan;
3. Pertumbuhan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek teknologi dan lingkungan;
4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan ancaman bencana dan perlunya peningkatan kapasitas dalam rangka kesiapsiagaan bencana;
5. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai dan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi sehingga kegiatan penanggulangan bencana masih belum optimal;
6. Belum optimalnya identifikasi potensi bencana karena luas wilayah Kabupaten Banyumas dan sifat kebencanaan yang beragam dan masih tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas;
7. Kendaraan operasional penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Banyumas sudah melebihi batas penggunaan dan sudah harus diperbaharui / kurang memadai dan beberapa merupakan pinjaman dari OPD lain.

Berdasarkan analisa *SWOT* diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penanggulangan bencana tersebut meliputi:

1. Adanya mekanisme teknis operasional pelaksanaan penanggulangan bencana;
2. Adanya keterlibatan unsur *Hexahelix* (Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media massa dan NGO) dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah menjadi 0,93.

Namun peningkatan kualitas pelaksanaan penanggulangan bencana belum sepenuhnya memecahkan masalah yang ada di Kabupaten Banyumas. Belum terpenuhinya 7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah secara maksimal menjadi permasalahan nyata di Kabupaten Banyumas. Berikut adalah 7 (tujuh) prioritas yang bisa menjadi solusi Indeks Ketahanan Daerah sehingga Indeks Risiko Bencana bisa menurun :

1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
3. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
4. Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
5. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik;
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana;

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31. Rancangan awal RKPD tahun 2026 menunjukkan BPBD memiliki 2 program dan 11 kegiatan.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027
BPBD Kabupaten Banyumas

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi Nilai kematangan organisasi	100 % 97 % 88,3 Angka 85,025 % 44 Angka	7.353.632.867,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi Nilai kematangan organisasi	100 % 97 % 88,3 Angka 85,025 % 44 Angka	7.353.632.867,01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100%	75.347.524,01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100%	75.347.524
			Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100%				Persentase kesesuaian program renja dengan DPA	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	53.037.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	53.037.000,00

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	22.310.524,01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	50.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%	5.505.139.707,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%	5.505.139.707,00
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.415.004.707,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	5.415.004.707,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.960.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	84.960.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5.175.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5.175.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	100%	2.270.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	100%	2.270.000,00

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.270.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	2.270.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66 Angka 100 %	402.525.316,00	#SPILL!		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66 Angka 100 %	402.525.316,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.719.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6.719.500,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.448.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.448.500,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.540.516,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.540.516,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	189.683.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	189.683.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 P	12 Paket	27.845.300,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 P	12 Paket	27.845.300,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	117.726.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	117.726.000,00

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.562.500,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	4.562.500,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	81%	32.601.500,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	81%	32.601.500,00
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	
	Pengadaan Mebel	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	61.374.500,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	61.374.500,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	umlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	25.351.500,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		umlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	25.351.500,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.500.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	4.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.046.163.820,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.046.163.820,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.031.020,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	149.031.020,00

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	897.132.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	897.132.800,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	289.585.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%	289.585.000,00
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	160.900.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	160.900.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	5.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	61.935.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	61.935.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	61.750.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	61.750.000,00

2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Persentase penanganan korban bencana yang tertangani Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	100 % 100 % 100 % 26,89 % 62,5 %	2.349.806.399,99	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Persentase penanganan korban bencana yang tertangani Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	100 % 100 % 100 % 26,89 % 62,5 %	2.349.806.399,99
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	720000 Orang	51.550.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	720000 Orang	51.550.000,00
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	720000 Orang	51.550.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	720000 Orang	51.550.000,00

	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1700 Orang	398.449.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1700 Orang	398.449.000,00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1200 Orang	59.730.000,00	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1200 Orang	59.730.000,00
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	0,00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	56.270.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	56.270.000,00

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	150 Orang	40.980.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	150 Orang	40.980.000,00
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	99.634.000,00	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	99.634.000,00
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300 Orang	141.835.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300 Orang	141.835.000,00

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	25250 Orang 100 % 100 % 100 %	2.557.759.000,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	25250 Orang 100 % 100 % 100 %	2.557.759.000,00
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	2.499.900,00	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	2.499.900,00
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	11.300.000,00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	11.300.000,00
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25,250 Orang	505.197.400,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25,250 Orang	505.197.400,00

	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen	2.500.000,00	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen	2.500.000,00
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	200 Orang	73.225.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	200 Orang	73.225.000,00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25,250 Orang	833.885.099,99	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25,250 Orang	833.885.099,99
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1.000.000,00	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	1.000.000,00
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Laporan	20.200.000,00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Laporan	20.200.000,00

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	450.000.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	450.000.000,00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	20.000.000,00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	20.000.000,00
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	13.450.000,00	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	13.450.000,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	5 Orang	24.999.200,00	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	5 Orang	24.999.200,00
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	37 Orang	40.008.000,00	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	37 Orang	40.008.000,00

	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	131.542.800,00	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	131.542.800,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	19 Lembaga	120.000.000,00	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	19 Lembaga	120.000.000,00
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	100.000.000,00

	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	0,00
--	---	--	--	-----------	---	---	--	--	-----------	------

Sumber : SIPD RI

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, dilaksanakan juga Forum OPD Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 untuk memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan BPBD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah teknis yang berkaitan memberikan usulan. Pelaksanaan Forum OPD ini dilaksanakan secara terpadu oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Dan juga pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan tingkat Kabupaten maupun Desa/Kelurahan untuk menampung aspirasi masyarakat serta usulan dari BPBD Kabupaten Banyumas yang semuanya dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas. Usulan tersebut dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Banyumas

No		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Catatan

Keterangan: Tabel ini menampilkan aktivitas dari hasil usulan forum Perangkat Daerah/ Musrenbang/usulan OPD.

2.6 INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya, BPBD Kabupaten Banyumas telah memiliki dan mengembangkan inovasi dalam penanggulangan bencana, salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan bencana. Inovasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. BPBD Kabupaten Banyumas terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayahnya. Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain:

Tabel 2

Inovasi BPBD Kabupaten Banyumas

NO	NAMA INOVASI	TUJUAN DAN LATAR BELAKANG INOVASI	BENTUK DAN RUANG LINGKUP INOVASI	TAHUN MULAI PELAKSANAAN DAN STATUS PELAKSANAAN	HASIL/IMPACT YANG TELAH DICAPAI	RENCANA PENGEMBANGAN INOVASI
1.	SIMBEBAS (Sistem Informasi Manajemen Bencana Banyumas)	Latar belakang : Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi. Topografi wilayah terdiri dari perbukitan, lereng gunung, serta dilewati sungai besar. Dari data di atas dapat dikatakan bahwa Kabupaten banyumas termasuk daerah yang rentan bencana. Tahun 2022 terdapat kejadian bencana sebanyak 1284 kejadian. Jumlah ini meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan jumlah bencana mencapai 432 kejadian. Kejadian selama periode tahun 2022 didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah. Bencana banjir sebanyak 120 kejadian, puting beliung 151 kejadian, dan tanah longsor sebanyak 964 kejadian. Dari keadaan yang ada diidentifikasi permasalahan dilapangan adalah: 1. Pengelolaan data aduan manual 2. Pendataan proses assessment manual 3. Pengelolaan pergudangan, masuk dan keluar barang kurang efektif 4. Pendistribusian bantuan ke masyarakat terhambat karena proses pendataan manual memakan waktu.	Inovasi SIMBEBAS bekerja melalui sistem layanan terpadu yang responsif, implementatif, dan kolaboratif. Layanan ini memungkinkan seluruh masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aduan bencana. Proses penanggulangan bencana juga cepat tangani.	Tahun mulai pelaksanaan Simbebas adalah Tahun 2021	Proses penanggulangan bencana lebih cepat dari mulai aduan masuk hingga distribusi bantuan. Simbebas sudah direplikasi oleh BPBD Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Magelang	Pengembangan dalam aplikasi Ronwasna (Ronda Waspada Bencana) dan Dijitupasna Cakap (Digitalisasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang Cepat, Akurat, dan Implementatif)

		Berdasar permasalahan di atas yang dirugikan adalah masyarakat terdampak bencana. Ketidakadaan sistem pendataan menyebabkan pelayanan publik tidak optimal. Berdasar dari latar belakang tersebut, inovasi SIMBEBAS (Sistem Informasi Manajemen Bencana Banyumas) digagas. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi solusi strategis percepatan proses penanggulangan bencana. Diinisiasi dan diterapkan oleh BPBD Kabupaten Banyumas untuk menanganani permasalahan penanggulangan bencana. Tujuan : Tujuan SIMBEBAS adalah mempercepat penyajian data informasi bencana, monitoring proses penanganan bencana secara realtime, pendistribusian bantuan dan pergudangan. Perumusan tujuan inovasi sebagai berikut: 1. Pengelolaan data aduan langsung melalui sistem 2. Pendataan segala alur dan pergerakan penanggulangan bencana termonitor melalui sistem 3. Pengelolaan data gudang, masuk keluar barang jelas dan termonitor 4. Pendistribusian bantuan tersalurkan dan diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana dengan lebih cepat.				
2.	Podcast Si Oben (Sinau Bareng Bencana)	Latar Belakang : Podcast merupakan salah satu teknologi digital yang menjadi alternatif untuk distribusi konten informasi, podcast memiliki keunggulan dalam fleksibilitas waktu untuk mendengarkannya. Selain itu, podcast	Merupakan podcast yang tayang di YouTube BPBD Kabupaten	Tahun mulai pelaksanaan si oben adalah tahun 2023	Podcast si oben sudah tayang 2 episode di laman Youtube BPBD	Rencana pengembangan untuk podcast mungkin akan mnghadirkan lagi

		memiliki keleluasaan untuk setiap orang agar bisa berkreasi selain itu podcast juga memiliki hubungan erat dengan kebiasaan anak muda untuk mengetahui sebuah informasi. Hal inilah yang mendorong BPBD Kabupaten Banyumas membuat inovasi podcast Si Oben (Sinau Bareng Bencana) sebagai sarana edukasi masyarakat tentang kebencanaan. Tujuan : Podcast Si Oben untuk mengedukasi dan mengenalkan masyarakat khususnya kaum milenial terhadap bencana dan membawa nuansa baru bahwa belajar tentang kebencanaan itu sangat penting. Kita harus bisa kenali bahayanya dan kurangi resikonya	Banyumas yang membahas hal-hal seputar bencana khususnya di Kabupaten Banyumas.		Banyumas dengan 2 Narasumber yang berbeda	narasumber yang dapat berbagi ilmu terutama ilmu penanggulangan bencana.
3.	PENA DEWI SIGRA (Pemetaan Mitigasi Bencana Destinasi Wisata Berbasis Sistem Informasi Geografis)	Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/136/2023 tentang Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Banyumas bahwa terdapat 7 ancaman bahaya di Kabupaten Banyumas, yaitu tanah longsor; banjir; cuaca ekstrim; kekeringan; letusan gunungapi; kebakaran hutan dan lahan; serta gempabumi. Dari banyaknya ancaman bencana yang ada di Kabupaten Banyumas, diperlukan upaya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Upaya ini disebut dengan mitigasi, dimana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan	PENA DEWI SIGRA merupakan microsite yang diperuntukkan khusus untuk informasi bencana dan mitigasi bencana destinasi wisata di Kabupaten Banyumas. PENA DEWI SIGRA dilengkapi dengan peta mitigasi bencana yang dapat diakses secara	Pelaksanaan PENA DEWI SIGRA dimulai pada bulan Oktober 2023, dengan pilot project adalah Lokawisata Baturraden.	Dengan adanya PENA DEWI SIGRA dengan pilot project Lokawisata Baturraden, kesadaran dan pengetahuan petugas, pelaku usaha maupun masyarakat terkait kebencanaan lebih meningkat. Sebagai hasil dari PENA DEWI SIGRA, BLUD UPT	Inovasi ini akan dikembangkan di destinasi wisata lain. Pada Lokawisata Baturraden, rencana inovasi akan dikembangkan dengan integrasi PENA DEWI SIGRA dengan e-ticketing

		peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Di Kabupaten Banyumas masih banyak pengelola wisata yang belum memiliki pemahaman terhadap mitigasi bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kesadaran pengelola wisata dan membuat pemetaan mitigasi bencana. Upaya pengurangan risiko bencana dengan membuat pemetaan mitigasi dapat menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis, seperti peta dan informasi spasial. Oleh karena itu BPBD Kab.Banyumas membuat Microsite Pena Dewi Sagra (Pemetaan Mitigasi Bencana Destinasi Wisata Berbasis Sistem Informasi Geografis) di Lokawisata Baturraden yang merupakan sebuah inovasi untuk membuat microsite atau website mini yang memuat informasi tentang bencana, potensi bencana, peta mitigasi bencana dan panduan penggunaannya, mitigasi tiap jenis bencana, dan tautan/link whatsapp kepada BPBD Kabupaten Banyumas. Media yang digunakan pada peta mitigasi terintegrasi dengan Google Map sehingga informasi peta dapat diakses oleh pengelola wisata maupun masyarakat secara real time, yang terintegrasi dengan link scan barcode dan dapat diakses oleh pengunjung di tempat wisata Baturraden.	real time melalui google map.		Lokawisata Baturraden juga telah memasang plang Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul sesuai dengan yang telah disarankan oleh BPBD Banyumas	
--	--	---	--------------------------------------	--	---	--

4.	SANCA EMAS (sebaran area potensi bencana di Kabupaten Banyumas)	Identifikasi risiko bencana di daerah masing-masing merupakan arahan Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas PB 2023. Hal tersebut relevan dengan paradigma penanggulangan bencana reaktif menuju ke proaktif. Harapan terbesar dalam proses ini adalah menemukan suatu kondisi janggal atau ketidaksesuaian dari suatu lokasi terhadap potensi bencana. Sehingga bencana tersebut dapat diminimalisir atau tidak terjadi. Sanca-Emas merupakan gambaran sebaran area potensi bencana di Kabupaten Banyumas. Peta tersebut merupakan implementasi dari Kajian Risiko Bencana BPBD Banyumas Tahun 2023. Pengguna dapat menggunakan sanca-emas sebagai alat bantu identifikasi risiko bencana. Pengguna hanya mengakses secara Real Time (saat itu juga) area rawan bencana di sekitarnya menggunakan HP melalui platform Google Maps.	Sanca Emas merupakan tools membantu masyarakat dalam mengidentifikasi suatu area terhadap kerawanan terhadap bencana, tanpa menginstall aplikasi apapun. Pengguna dimanjakan dengan peta G-Maps yang sudah dikenal dalam berbagai penggunaan di HP. Hanya dengan mengakses s.id/SancaEmas , area berbahaya kategori kebencanaan dalam genggam pengguna. Akses peta rawan bencana secara realtime	Pelaksanaan Sanca Emas mulai Tahun 2023. Status pelaksanaan berjalan dengan berhasil dan sukses. Dapat dijalankan dengan baik oleh Masyarakat	Hasil yang dicapai adalah 4 desa, 1 Universitas dan 1 Makorem sudah disosialisasikan penggunaan Sanca Emas	Pengembangan berikutnya adalah updating data lebih baik lagi dan memperbanyak tema kebencanaan
----	--	---	---	---	--	--

5.	EMINA (Edukasi Mitigasi Bencana)	Pendidikan merupakan sarana terancang dalam menanamkan budaya tangguh bencana kepada anak-anak. Untuk menanamkan watak siaga bencana, setidaknya ada 3 pilar utama yang harus ditempuh oleh sekolah. Ketiga pilar tersebut antara lain: Pilar pertama berbicara tentang fasilitas sekolah aman, pilar kedua tentang manajemen, dan pilar ketiga berbicara tentang pendidikan PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Dari ketiga pilar tersebut, masih perlu diterjemahkan ke dalam poin-poin yang bisa dijadikan standarisasi maksimal penerapan sekolah aman bencana.	Ebook Mitigasi Bencana merupakan microsite yang disusun oleh Tim BPBD Kabupaten Banyumas. Ebook Edukasi Mitigasi Bencana merupakan Media Edukasi yang disusun oleh Tim BPBD Kabupaten Banyumas. Ebook Edukasi Mitigasi Bencana ini bertujuan dalam peningkatan mutu pelayanan BPBD Kabupaten Banyumas kepada masyarakat khususnya kepada Siswa maupun Pengajar di Lingkungan Sekolah di daerah rawan bencana.	Pelaksanaan sosialisasi Ebook Mitigasi Bencana dimulai pada bulan Oktober 2023, dengan pilot project adalah SMP N 3 Gumelar, SMAN 1 Patikraja, dan SMA N 1 Jatilawang	Dengan adanya sosialisasi Ebook Mitigasi Bencana dengan pilot project SMP N 3 Gumelar, SMAN 1 Patikraja, dan SMA N 1 Jatilawang maka diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi murid dan guru di lingkungan sekolah	Rencana kedepannya updating data serta pembaharuan tampilan
----	----------------------------------	---	---	---	---	---

6.	RONWASNA (Ronda Waspada Bencana)	RONWASNA, singkatan dari Ronda Waspada Bencana, adalah program yang dilaksanakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Banyumas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. Sebuah Program untuk meningkatkan respon cepat penanganan darurat bencana di Kabupaten Banyumas. Merupakan upaya membangun jaringan informasi respons dini bencana yang terstruktur dari desa, memberdayakan unsur kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, masyarakat atau relawan secara offline dan online melalui teknologi informasi serta jaringan koordinasi informasi terdepan	Pemanfaatan teknologi menjadi aspek utama untuk mendukung system RONWASNA seperti pengembangan aplikasi SIMBEBAS untuk pelaporan dan analisis data secara realtime, whatsapp untuk stakeholder. Teknologi mempercepat penyebaran informasi, meningkatkan efisiensi koordinasi dan mendorong keterlibatan lebih luas dari berbagai pihak. Sebagai wujud nyata aksi ini yaitu penyusunan grup whatsapp Ronwasna dan pembuatan aplikasi Ronwasna	Tahun mulai pelaksanaan 2025, status sudah mulai dilaksanakan dan diimplementasikan dalam peta cuaca dan bencana harian	Adanya Laporan Peta Cuaca dan Bencana Harian	-
----	--	---	---	---	--	---

			sebagai jaringan inti informasi dini cepat dalam penanggulangan bencana.			
7.	DIJITUPASNA CAKAP (Digitalisasi Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang Cepat, Akurat, dan Implementatif)	DIJITUPASNA CAKAP adalah inovasi digital BPBD Kabupaten Banyumas yang menghadirkan solusi nyata dalam mempercepat pemulihan pascabencana. Terintegrasi dalam aplikasi SiMBebas, fitur ini memungkinkan pengumpulan dan validasi data kebutuhan secara digital, real-time, dan kolaboratif oleh BPBD, OPD teknis, hingga pemerintah desa. Tak hanya memangkas waktu dan anggaran, DIJITUPASNA CAKAP juga merepresentasikan transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih tangkas, responsif, dan partisipatif, dengan melibatkan unsur pentahelix (masyarakat/relawan, dunia usaha, akademisi, dan media) dalam satu sistem terpadu. Inilah langkah nyata BPBD Kabupaten Banyumas menuju tata kelola penanggulangan bencana yang lebih cepat, akurat, dan implementatif. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat pengumpulan data kebutuhan pascabencana secara real-time, efisien, dan tepat sasaran menuju pemulihan pascabencana yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas	Fitur DIJITUPASNA CAKAP dalam aplikasi SiMBebas yang terintegrasi dengan perangkat digital berbasis kolaborasi lintas sektor dan Pentahelix.	Tahun mulai pelaksanaan 2025, status masih berprogress. Pada saat ini sudah terintegrasi data dengan Dinperkim, untuk kelanjutannya akan diintegrasikan dengan DPU, DLH, Dinkannak, Dinpertan.	Pada saat ini sudah terintegrasi data dengan Dinperkim	Untuk kelanjutannya akan diintegrasikan dengan DPU, DLH, Dinkannak, Dinpertan dan SKPD terkait lainnya
8.	SMART KRISNA (Sinergi	SMART KRISNA (Sinergi Masyarakat Kurangi Risiko Bencana) bertujuan untuk	Inovasi SMART KRISNA (Sinergi	Penguatan tersebut langsung	FPRB 2 Kecamatan	Jangka Menengah yaitu Pilot Project

	Masyarakat Kurangi Risiko Bencana) mengoptimalkan kesiapsiagaan melalui kolaborasi multipihak berbasis hexahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan organisasi non pemerintah. Pendekatan SMART KRISNA diwujudkan melalui pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah strategis dalam koordinasi mitigasi bencana. Forum ini akan menyusun rencana aksi daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah. FPRB dibentuk sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan keterlibatan multipihak dalam pengurangan risiko bencana. FPRB ini diharapkan mampu berperan sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pengurangan risiko bencana secara partisipatif dan berkelanjutan.	Masyarakat Kurangi Risiko Bencana) yang diwujudkan melalui Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Banyumas dengan melibatkan unsur Hexahelix yakni Pemerintah, Masyarakat, Akademisi, Dunia Usaha, Media dan NGO.	dilakukan oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Ruang Smart Room Graha Satria pada 2 Juli 2025	(Patikraja, Tambak) FPRB Desa (4 Desa :Kedungwuluh Kidul, Karanganyar, Plangkapan, Watuagung) Keterlibatan NGO dalam penyusunan Buku Dongeng Siaga Bencana Kick Off SPAB dengan Puhua School Putera Harapan	SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di Kabupaten Banyumas, dan jangka panjang nya adalah integrasi perencanaan pembangunan Kabupaten Banyumas yang terpadu dan berbasis pengurangan risiko bencana
--	--	---	---	--	---

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan RPJMN

Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2027 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

RKP Tahun 2027 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/ Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. s

Sedangkan Visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah *“Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”*. Kemudian dilaksanakan melalui enam misi antara lain:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yang merupakan tahap kedua “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” Provinsi Jawa Tengah, difokuskan pada tema pembangunan yaitu “Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan dengan prioritas daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah;
2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis lingkungan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ditetapkan Program Delegasi Gubernur Jawa Tengah yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Program Delegasi Gubernur tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
2. Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta;
3. Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
4. Cek Kesehatan Gratis;
5. Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;
6. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;

7. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);
9. Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional;
10. Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
11. Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru;
12. BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng);
13. Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat;
14. Melahirkan Pemerintahan yang Good Clean Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;
15. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
16. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
17. Peningkatan operasional kader Posyandu;
18. Peningkatan kualitas hidup lansia;
19. Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru;
20. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
21. Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis;
22. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
23. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
24. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hydro, maupun tenaga surya;
25. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
26. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
27. Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM;
28. Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau;

29. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa;
30. Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
31. Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan;
32. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
33. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
34. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;
35. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana.

Prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027

merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 untuk rencana pembangunan tahun 2027 serta penyelarasan terhadap RKP 2027 dan RKPD Provinsi tahun 2027. Prioritas pembangunan disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, dan politis. Integrasi pendekatan perencanaan teknokratis, politik dan partisipasi dilaksanakan agar program-program dalam RKPD Kabupaten Banyumas merupakan program prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran pembangunan. Program-program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat sebagai hasil rumusan perencanaan politik dalam bentuk aspirasi akan dipadukan dengan perencanaan teknokratif dan partisipatif.

Mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Banyumas Tahun 2025 diarahkan sesuai Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu

“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung tiga frasa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Produktif

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar atau maksimal, secara terus menerus dengan efisiensi penggunaan waktu dan sumber daya. Berdasarkan pengertian tersebut produktif mencakup pencapaian hasil/tujuan, pemanfaatan sumber daya, dan keberlanjutan. Dengan demikian daerah yang produktif dapat dimaknai sebagai daerah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Daerah yang produktif mencakup sumber daya manusia, kelembagaan/organisasi, dan sektor ekonomi yang produktif. Dalam konteks perencanaan jangka menengah Kabupaten Banyumas produktif difokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. dengan demikian Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien, baik di sektor pertanian, industri, maupun sektor lainnya. Daerah yang produktif menunjukkan performa ekonomi yang baik dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Secara lebih luas Kabupaten Banyumas yang produktif adalah daerah yang memiliki ekonomi yang kuat, menghasilkan banyak lapangan kerja, dan mampu bersaing baik di tingkat lokal maupun global.

Adil

Adil berarti memberikan perlakuan yang setara dan tidak memihak, serta memastikan bahwa hak-hak setiap individu atau kelompok dihormati tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip keadilan mengedepankan pemenuhan hak, perlindungan terhadap orang yang lemah, dan pembuatan keputusan yang didasarkan pada alasan yang rasional dan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku.

Pemerintah Daerah yang adil adalah Pemerintah daerah yang melindungi hak-hak Masyarakat, dan berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Pemerintahan daerah yang adil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara yang setara, transparan, dan berpihak pada kepentingan seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.

Sejahtera

Sejahtera berarti kondisi yang baik dan makmur. Kata ini merujuk pada keadaan masyarakat hidup dalam kebahagiaan, kesehatan, dan kecukupan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan psikologis. Secara umum, sejahtera menggambarkan kondisi di mana kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik, ada kedamaian, dan setiap orang memiliki akses yang layak terhadap pendidikan, pekerjaan, serta layanan kesehatan yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, Daerah yang sejahtera adalah daerah di mana warga masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Daerah yang sejahtera memiliki berbagai karakteristik untuk kehidupan masyarakatnya, antara lain kondisi ekonomi yang baik, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, keamanan dan ketertiban, infrastruktur yang memadai, keseimbangan alam dan lingkungan, serta kehidupan sosial yang harmonis.

Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 akan diwujudkan dengan pencapaian misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Misi meningkatnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Misi ini didukung dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui pemerataan layanan pendidikan bermutu serta terwujudnya kesehatan masyarakat yang baik melalui peningkatan pelayanan kesehatan untuk semua, peningkatan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan kepemudaan agar masyarakat Banyumas menjadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkarakter maka masyarakat Banyumas perlu memiliki dan mengaktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius dalam kehidupan masyarakat sebagai jati diri. Selain itu pembentukan karakter yang unggul juga dapat dimiliki oleh pemuda melalui peningkatan peran dan daya saing pemuda, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan

Misi ini mengarah pada visi Banyumas yang produktif. Untuk mendukung Misi ini dilaksanakan dengan menggerakkan industri kerakyatan, pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM, didukung oleh peningkatan iklim investasi dan dunia usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas.

3. Memperkuat ketahanan pangan

Banyumas yang sejahtera juga diwujudkan dengan memperkuat ketahanan pangan. Misi ini mencakup upaya-upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan pengembangan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah. Selain itu misi ini didukung dengan upaya untuk meningkatkan keterjangkauan dan keamanan pangan.

4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan

Untuk mewujudkan Banyumas yang adil, misi ini dilaksanakan melalui pemerataan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pemerataan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan pendekatan daya saing infrastruktur daerah serta pengembangan perdesaan, perkotaan, dan pusat pertumbuhan. Melalui upaya ini sumber daya daerah dikelola dengan bijak untuk memastikan pembangunan merata di seluruh wilayah, dan wilayah dapat berkembang sesuai potensi, peran dan fungsinya.

5. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah

Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Misi ini mendukung terwujudnya Banyumas yang sejahtera. Meningkatnya keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, meliputi peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yaitu misi no. 6 (enam) yaitu **Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup**

Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih telah menetapkan program unggulan ‘TRILAS’ yaitu 13 program unggulan Bupati, BPBD Kabupaten Banyumas mendukung Trilas nomor 12 yaitu Penyediaan Air Bersih untuk Masyarakat, dengan aktivitas Jaminan bantuan air bersih di wilayah yang rawan kekeringan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 yaitu ***“Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan”***, dengan prioritas pembangunan Tahun 2027 sebagai berikut:

1. Pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat terutama Pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan;
4. Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan isu strategis;
5. Peningkatan daya saing infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah;

Prioritas pembangunan Tahun 2027 yang terkait kinerja BPBD Kabupaten Banyumas yaitu prioritas kabupaten no. 4 (Empat) yaitu **Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan isu strategis.**

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran dilakukan untuk merespons isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub-urusan kebencanaan.

Rencana pembangunan disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: *“Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.”* Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diarahkan untuk *“Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan”*.

Adapun tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas Tahun 2027 seperti yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target 2027
					2025	
Menurunnya risiko bencana		Indeks Risiko Bencana	Risiko = Ancaman x (Kerentanan/Kapasitas)	Angka	82,87	82,85
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	$(P1 \times 6\%) + (P2 \times 6\%) + (P3 \times 7,5\%) + (P4 \times 10,5\%) + (P5 \times 21\%) + (P6 \times 35\%) + (P7 \times 14\%)$	Angka	0,93	0,95
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan LHE Inspektorat tahun n	Angka	89,35	89,72
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,67	3,69
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,774	3,776

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banyumas Tahun 2027

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Sumber Data : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKD terdiri dari 284 pertanyaan dengan 7 prioritas program penanggulangan risiko bencana dan memiliki 71 indikator berdasarkan kepada Perka No. 03 Tahun 2012 BNPB tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana. Penilaian terhadap parameter dan indikator akan menghasilkan nilai indeks untuk setiap jenis bahaya yang berpotensi. Nilai indeks per bencana tersebut akan dikelompokkan ke dalam kelas kapasitas daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kelas tinggi dengan nilai indeks kesiapsiagaan 0,8 - 1.
- Kelas sedang dengan nilai indeks kesiapsiagaan 0,4 - 0,7.
- Kelas rendah dengan nilai indeks kesiapsiagaan 0 - 0,3.

P : Prioritas Indeks Ketahanan Daerah

Sumber Data : Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah

7 Prioritas Indeks Ketahanan Daerah terdiri dari :

- (P1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- (P2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (P3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (P4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (P5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (P6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- (P7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan penanggulangan bencana bidang kedaruratan dan logistik, pencegahan dan

kesiapsiagaan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Banyumas. Penyusunan perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi BPBD dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

BPBD mempunyai 2 program dan 11 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tiga bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2027 yaitu Rp **9.703.439.267,-**

dengan seluruhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas. Berikut lampiran rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2027 dan perkiraan maju tahun 2028 pada tabel T-C.33:

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Banyumas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				9.703.439.267,00				12.457.972.000,00
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.703.439.267,00				12.457.972.000,00
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.703.439.267,00				12.457.972.000,00
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi		100 % 97 % 88,3 Angka 85,025 % 44 Angka	7.353.632.867,01				8.224.100.000,00

						Nilai kematangan organisasi							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra		100%	75.347.524,01				172.000.000,00
						Persentase kesesuaian program renja dengan DPA		100%					
1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	4 Dokumen	53.037.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			122.000.000,00
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	13 Laporan	22.310.524,01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)		100%	5.505.139.707,00				3.719.182.800,00
						Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%					
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	45 Orang/bulan	5.415.004.707,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.630.964.800,00
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12 Dokumen	84.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79.560.000,00
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	5 Dokumen	5.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.658.000,00
	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik		100%	2.270.000,00				5.868.000,00
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12 Dokumen	2.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.868.000,00

1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		66 Angka 100 %	402.525.316,00				664.381.080,00
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	6 Paket	6.719.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.010.500,00
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	4 Paket	43.448.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69.318.500,00
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	4 Paket	12.540.516,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.495.221,00
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12 Paket	189.683.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			252.168.000,00
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 P	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12 Paket	27.845.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.638.859,00
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	48 Laporan	117.726.000,00				272.105.000,00

1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12 Dokumen	4.562.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.645.000,00
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)		81%	32.601.500,00				1.257.181.700,00
						Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah		100%					
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	25 Unit	61.374.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.750.000,00
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	16 unit	25.351.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.239.931.700,00
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	2 Unit	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.500.000,00
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	100%	1.046.163.820,00				1.751.268.620,00

1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	149.031.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			180.547.500,00
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12 Laporan	897.132.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.570.721.120,00
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		80%	289.585.000,00				654.217.800,00
						Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100%					
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	27 Unit	160.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			462.622.800,00
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	5 Unit	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.500.000,00
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	80 Unit	61.935.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87.095.000,00

1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	2 Unit	61.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			97.000.000,00
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Persentase penanganan korban bencana yang tertangani Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun		100 % 100 % 100 % 26,89 % 62,5 %	2.349.806.399,99				4.233.872.000,00
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		720000 Orang	51.550.000,00				250.000.000,00

1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		720000 Orang	51.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1700 Orang	398.449.000,00				704.228.800,00
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1200 Orang	59.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000,00
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan,	100 Keluarga	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00

							Semua Kel/Desa						
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan	56.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000,00
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	40.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000,00
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	99.634.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00

1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
1	05	03	2.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	141.835.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			334.228.800,00
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)		25250 Orang 100 % 100 % 100 % 100 %	2.557.759.000,00				2.808.971.600,00

1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.499.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.500.000,00
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	11.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.400.000,00
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,250 Orang	505.197.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.089.000.000,00
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Orang	73.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00

1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,250 Orang	833.885.099,99	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.564.971.600,00
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu		1 Dokumen	1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.000.000,00
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota		3 Laporan	20.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			124.100.000,00
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana		100 %	450.000.000,00				470.671.600,00
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	13.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000,00

1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	24.999.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			31.250.000,00
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37 Orang	40.008.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000,00
1	05	03	2.04	0008	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kegiatan	131.542.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			98.000.000,00

1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Lembaga	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			94.750.000,00
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.671.600,00
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000,00

1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000,00
---	----	----	------	------	---	--	--	-----------	---	------------------------------	--	--	---------------

Sumber : SIPD RI

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 ditunjukkan pada lampiran matrik Rancangan Renja yang telah disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 dan Renstra BPBD Kabupaten Banyumas 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas
Terhadap Program Unggulan Bupati /TRILAS**

No	Program TRILAS	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Target Aktivitas	Pagu Anggaran Aktivitas
1.	Penyediaan air bersih untuk masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Tandon Air untuk daerah terdampak kekeringan	Unit/ RT	100	124.950.000,00
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Dropping Air Di Wilayah Kekeringan	Liter/ Jiwa	173	505.197.400,00
			Persentase penanganan darurat sarana prasana yang		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan						

			terdampak bencana		darurat bencana						
			Persentase penanganan korban bencana yang tertangani		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana						
			Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IKM Perangkat Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan kendaraan tangki air	Unit	3	32.650.000,00

			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Truk Serbaguna	Unit	1	21.000.000,00
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi					Pemeliharaan Excavator	Unit	1	50.000.000,00
			Nilai kematangan organisasi								

Tabel 4.2.1. Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas Terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam berkolaborasi menangani isu strategis	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
			Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota

			Persentase penanganan korban bencana yang tertangani			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
			Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana
					Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		
					Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap		

					kejadian bencana		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
						Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan
						Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

**Tabel 4.2.2 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas
dengan Program Delegasi Gubernur**

No	Program Delegasi Gubernur	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota
			Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana

			Persentase penanganan korban bencana yang tertangani			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana
			Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
					Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis
					Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal

					Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi
						Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal

**Tabel 4.2.3 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas
dengan Program Prioritas Nasional**

No	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Penanggulangan Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun

			Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana				
			Persentase penanganan korban bencana yang tertangani	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat
			Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas

					Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal
					Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		

				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal
--	--	--	--	--	---	---	---

Tabel 4.2. 4 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
	-	-	-	-	-	-	-

**Tabel 4.2.5 Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Banyumas
dengan Program Strategis Nasional**

No	Program Strategis Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Bencana	Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun
			Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana

			Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
			Persentase penanganan korban bencana yang tertangani		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		
			Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		
					Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		

				Penataan sistem dasar Penanggulangan bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana kabupaten/kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal
--	--	--	--	--	---	--	---

**4.3. MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2027**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Subkegiatan					Keterangan
							Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah				9.703.439.267,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.703.439.267,00		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				9.703.439.267,00		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah IKM Perangkat Daerah Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi Nilai kematangan organisasi	100 % 97 % 88,3 Angka 85,025 % 44 Angka		7.353.632.867,01		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100%		75.347.524,01		
						Persentase kesuaian program renja dengan DPA	100%				

1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	53.037.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	22.310.524,01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%		5.505.139.707,00		
						Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	5.415.004.707,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	84.960.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	5.175.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja baik	100%		2.270.000,00		
1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	2.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	66 Angka 100 %		402.525.316,00		
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	6.719.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	43.448.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	12.540.516,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	189.683.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 P	12 Paket	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	27.845.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	117.726.000,00		
1	05	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	4.562.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	81%		32.601.500,00		
						Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%				
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	61.374.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	umlah Unit Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	25.351.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	4.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	1.046.163.820,00		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		149.031.020,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	897.132.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	80%		289.585.000,00		
						Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%				

1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	160.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	61.935.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Banyumas, Purwokerto Selatan, Berkoh	61.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat sarana prasana yang terdampak bencana Persentase kejadian bencana yang dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) Persentase penanganan korban bencana yang tertangani Persentase Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang terbentuk Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Kontinjensi yang disusun	100 % 100 % 100 % 26,89 % 62,5 %		2.349.806.399,99		

1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	720000 Orang		51.550.000,00		
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	720000 Orang		51.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1700 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	398.449.000,00		
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1200 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.730.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	100 Keluarga	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.270.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	150 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.634.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	300 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.835.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	25250 Orang 100 % 100 % 100 % 100 %		2.557.759.000,00		
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.300.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	25,250 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	505.197.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	2 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	200 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.225.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25,250 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833.885.099,99	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen		1.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3 Laporan		20.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana	100 %		450.000.000,00		
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.450.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	5 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.999.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	37 Orang	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.008.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.04	0008	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.542.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	19 Lembaga	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
---	----	----	------	------	---	--	-----------	--	---	------------------------------	--

Sumber : SIPD RI

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja Rancangan Awal) Rancangan Awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2027. Rancangan Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Memperhatikan alokasi pagu indikatif BPBD Kabupaten Banyumas tahun 2027 saat ini **belum mencukupi** untuk mendanai seluruh kebutuhan program penanggulangan bencana sesuai standar pelayanan minimal (SPM). Kondisi ini berpotensi menghambat optimalisasi upaya mitigasi dan kesiapsiagaan darurat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan anggaran tambahan atau penguatan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pemenuhan target kinerja dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027, beberapa kaidah pelaksanaan berikut:

1. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2027 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2027 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2027.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rancangan Renja BPBD Kabupaten Kabupaten Banyumas Tahun 2027 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 13 Maret 2026

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,

Dwi Irawan Sukma, S.STP., M.Hum.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197611111996021001

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja Rancangan Awal) Rancangan Awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2026. Rancangan Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026, beberapa kaidah pelaksanaan berikut:

5. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya.
7. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026.
8. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rancangan Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2026 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 19 Agustus 2025

Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Banyumas,

Budi Nugroho, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780522 199703 1 003